

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 050 / 033 / DKISP / 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);

52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 22 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2022, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Parigi, 22 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **I**

BAB I PENDAHULUAN **1**

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD..... **8**

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021 8

 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD 11

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... **13**

 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 13

BAB IV PENUTUP **15**

 PENUTUP 15

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD Perubahan (RAPBD Perubahan) Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan

- Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
 50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);
 52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2022 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 adalah untuk:

- a. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2022;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2022;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;

- d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 s/d Triwulan II
- 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2022.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 51,42%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.558.186.449,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.257.734.044,- atau 49,16%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.300.452.405,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 51,42%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 51,42%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-
- Pelaporan Pengelolaan Rertribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.200.000,- atau 51,51%. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.600.000,-

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 51,72%. Sisa anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 1.940.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 714.000,- atau 36,79%. Sisa anggaran Rp. 1.226.520,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 113.571.143,- dan terealisasi Rp. 66.489.889,- atau 58,54%. Sisa anggaran sebesar Rp. 47.081.254,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 5.515.954,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.436.500,- atau 26,04%. Sisa anggaran Rp. 4.079.454,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.140.000,- atau 16,78%. Sisa anggaran Rp. 10.610.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 42,66%. Sisa anggaran Rp. 10.320.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 149.981.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.898.900,- atau 10,60%. Sisa anggaran Rp. 134.082.100,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%. Sisa anggaran Rp. 0,-
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.630.350,- atau 37,57%. Sisa anggaran Rp. 4.369.650,-

- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 329.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 152.727.012,- atau 46,40%. Sisa anggaran Rp. 176.372.988,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 125.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.070.000,- atau 45,57%. Sisa anggaran Rp. 68.150.000,-
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 113.996.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.742.800,- atau 28,72%. Sisa anggaran Rp. 81.253.496,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 27.511.264,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.400.800,- atau 15,99%. Sisa anggaran Rp. 23.110.464,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.725.000,- atau 36,33%. Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.775.000,-
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 9.885.000,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 58.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.875.000,- atau 33,73%. Sisa anggaran Rp. 39.040.000,-
- Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 51,85%. Sisa anggaran Rp. 7.800.000,-

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.181.500,- atau 33,63%. Sisa anggaran Rp. 331.818.500,-

3. Program Aplikasi Informatika

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 125.068.750,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,- atau 44,61. Sisa anggaran Rp. 69.268.750,-
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 134.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.400.000 atau 28,55%. Sisa anggaran Rp. 96.100.000,-

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 51,72%. Sisa anggaran Rp. 8.400.000,-

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Adanya himbauan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid sehingga terjadinya pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan.
2. Kurangnya SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baik secara kuantitas maupun secara kualitas berakibat pada penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai target waktu, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/ kegiatan sesuai rencana. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam konteks organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan aplikasi di lingkup Kabupaten Pangandaran sehingga informasi yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan. Meningkatkan kemampuan dari sisi kapasitas dan ketersediaan layanan informasi;
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman pegawai dalam program dan kegiatan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
5. Optimalisasi penggunaan anggaran;
6. Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman standar pelaksanaan tupoksi.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Perumusan perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 telah mempertimbangkan beberapa faktor dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran instansi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai standar pelayanan minimal. Adapun perubahan program dan kegiatan tahun 2022 pada urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Parigi, 22 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720106 199803 1 002

LAPORAN EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAAN

No	Kode	SKPD/Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Rencana PD Tahun 2022-2023		Realisasi capaian Kinerja Rencana Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang diawakali		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran/Renca yang diawakali tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d tahun 2022 (%)		Ket.
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%	
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6+12	15 = 14/5*100	16												
1		DIBERI KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERBANDIAN				6.863.364.000	0,00	4.612.864.000		4.532.444.376		975.918.996	1.079.726.799,00	=	=			2.055.645.795	45,38			0,00		-	0,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.863.364.000	0,00	4.612.864.000		4.532.444.376		975.918.996	1.079.726.799,00	=	=			2.055.645.795	45,38								
3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		%		6.873.364.000		4.583.864.000	95,00	4.515.041.376		971.718.996	1.074.926.799,00	=	=			2.046.645.795	45,39								
4		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terjangkau																								
5			2. Persentase sumber informasi dengan kualitas baik	%		4.358.364.000	0,00	2.431.889.965	91,00	3.080.157.626		892.553.696	863.435.799,00	=	=			1.765.998.295	47,73								
6			3. Persentase administrasi komunikasi yang akurat																								
7			4. Persentase Personalia dan evaluasi kinerja yang berkualitas																								
8		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu																								
9			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%		212.800.000		21.000.000	91,00	21.000.000		5.100.000	5.700.000,00	=	=			10.800.000	51,49			51.800.000	100,00	14,94			
10			3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu																								
11		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3,00	212.800.000	3,00	21.000.000	8,00	21.000.000	3,00	5.100.000	9,00	5.700.000,00			3,00	10.800.000	100,00	51,48	3,00	31.800.000	100,00	14,94			
12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mempunyai laporan kinerja keuangan dengan baik	%		15.790.152.148		1.938.487.374	91,00	2.579.186.449		671.776.683	596.743.361,00	=	=			1.258.534.044									
13		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	29,00	15.359.352.148	20,00	1.914.497.374	23,00	2.558.186.449	18,00	666.670.683	29,00	591.063.361,00			29,00	1.257.794.044	100,00	49,17	18,00	3.172.291.418	85,71	20,39			
14		Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Anggaran APBD	Jumlah Dokumen Penabersihan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan APBD	dokumen	3,00	230.800.000	3,00	24.000.000	3,00	21.000.000	3,00	5.100.000	3,00	5.700.000,00			3,00	10.800.000	100,00	51,48	3,00	34.800.000	100,00	15,08			
15		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	unit		212.800.000		21.800.000	250,00	21.800.000		5.100.000	5.700.000,00	=	=			20.800.000									
16		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah [] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3,00	212.800.000			1,00	21.000.000	1,00	5.100.000	3,00	5.700.000,00			3,00	10.800.000	100,00	51,48	3,00	10.800.000	14,29	5,08			
17			jenis			7,00	21.000.000																				
18			unit			480,00																					
19		Administrasi Pendapatan Daerah Kawerangan Perangkat daerah	Persentase administrasi pendapatan yang diterima perangkat daerah	%		168.500.000		19.800.000	5,00	19.800.000		4.800.000	5.400.000,00	=	=			10.200.000									
20		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah [] Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	1,00	168.500.000			1,00	19.800.000	1,00	4.800.000	1,00	5.400.000,00			1,00	10.200.000	100,00	91,52	3,00	10.200.000	100,00	6,02			
21			laporan			1,00	19.800.000																				
22		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	%		153.320.000		17.400.000	91,00	17.400.000		4.200.000	4.800.000,00	=	=			9.000.000									
23		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	3,00	153.320.000			3,00	17.400.000	3,00	4.200.000	3,00	4.800.000,00			3,00	9.000.000	100,00	51,72	3,00	9.000.000	100,00	5,87			
24			laporan			3,00	17.400.000																				
25		administrasi umum kepegawaian	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%		3.441.406.630		82.093.300	91,00	391.759.617		18.876.880	76.282.400,00	=	=			94.339.289									
26		Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	paket	3,00	13.041.290			1,00	1.940.520	1,00	378.000	1,00	336.000,00			1,00	714.000	100,00	36,79	3,00	714.000	70,00	2,16			
27			jenis			2,00	685.000																				
28		Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	paket	2,00	1.287.690.950			2,00	113.571.148	1,00	9.569.899	1,00	56.920.000,00			2,00	66.489.899	100,00	58,54	3,00	66.489.899	100,00	5,16			
29			unit			1,00	13.052.000																				

No	Kode	SDPD/Likuidasi/Program (Lampiran Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) (Program/Kegiatan pada Perubahan Rerje PO 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)		Target Rerje PO Tahun 2022-2023		Realisasi capaian Kinerja Rerje Tahun 2021 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Rerje PO Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rerje yang direvisi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerje (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rerje s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rerje)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerje s/d tahun 2022 (%)		Ket.				
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	%		Kinerja	Rp	Kinerja	%
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9*10/11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16								
30				Jenis		66,00																					
31		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1,00	46.543.650			1,00	5.915.954	1,00	986.500	1,00	500.000,00			1,00	1.436.500	100,00	26,04	1,00	1.436.500	100,00	3,08			
32				Jenis		4,00	2.953.700																				
33		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3,00	114.870.000			3,00	12.750.000	1,00	1.077.500	3,00	1.062.500,00			3,00	2.140.000	100,00	16,78	1,00	2.140.000	93,98	1,86			
34				Jenis		9,00	3.732.000																				
35		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1,00	149.400.000			1,00	18.000.000	6,00	3.840.000	1,00	3.840.000,00			1,00	7.680.000	100,00	42,87	6,00	7.680.000	100,00	5,14			
36				Jenis		1,00	15.360.000																				
37		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24,00	1.881.887.000	24,00	76.528.800	24,00	149.981.000	12,00	2.275.000	6,00	13.673.900,00			18,00	15.896.900	75,00	10,60	12,00	47.277.900	50,00	2,31			
38		Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan (PMBD) pemilikan Daerah	Perencanaan pengadaan barang milik daerah yang terakumulasi	%		810.800.000		100.800.000	91,08	100.800.000								100.000.000									
39		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1,00	810.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000						100,00	100,00	1,00	200.000.000	100,00	24,69				
40		Pengadaan Jasa Pemangung Usaha Pemertanahan Daerah	Perencanaan jasa pemangung usaha pemertanahan yang direvisi	%		1.182.979.852		152.244.931	91,08	461.928.000		62.581.124		149.836.236,80													
41		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1,00	58.100.000			1,00	7.000.000	1,00	1.000.000	1,00	1.630.350,00			1,00	2.630.350	100,00	37,58	1,00	2.630.350	100,00	4,58			
42				bahan		40,00	3.638.500																				
43		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5,00	2.030.993.352			5,00	329.100.000	5,00	38.921.124	5,00	119.405.888,00			5,00	152.727.012	100,00	46,41	3,00	152.727.012	60,00	7,52			
44				relawan		3,00	35.569.931																				
45		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3,00	1.088.388.000			3,00	125.220.000	4,00	28.270.000	3,00	28.800.000,00			3,00	57.070.000	100,00	45,58	4,00	57.070.000	100,00	5,32			
46				bulan		12,00	119.086.500																				
47				orang		6,00																					
48		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan (PMBD) pemilikan Daerah	Perencanaan pemertanahan yang baik dan layak bangun	%		1.340.116.548		79.853.960	91,08	198.892.540		26.914.880		18.953.880,80													
49		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2,00	871.183.548	3,00	71.048.280	2,00	119.998.296	2,00	16.734.000	2,00	16.006.800,00			2,00	32.742.800	100,00	28,72	2,00	109.791.080	100,00	11,91			
50		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya	unit	3,00	276.895.000	2,00	7.130.700	3,00	27.511.264	3,00	2.205.800	3,00	2.195.000,00			3,00	4.400.800	100,00	16,00	3,00	11.531.500	100,00	4,18			
51		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5,00	53.100.000	10,00	1.875.000	5,00	7.500.000	5,00	1.875.000	5,00	750.000,00			5,00	2.725.000	100,00	96,93	5,00	4.400.000	100,00	7,99			
52		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1,00	96.940.000			1,00	9.885.000	0,00						0,00	0,00	0,00				0,00				
Jumlah realisasi anggaran kinerja (Rp)																		88.79	40.64	3.08	100000000.00	79.58	7.68				
Realisasi Kinerja (Rp)																		(Rp)	(Rp)	(Rp)							
53		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perencanaan total biaya layanan informasi publik, Persentase total biaya komersial publik	%		9.827.140.000	0,00	767.415.986	60,80	575.115.000		34.165.980		162.291.980,80					5,80	196.456.980							
54		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perencanaan ketercapaian konten yang diinformasikan melalui media massa dan lainnya	%		9.827.140.000		767.415.986	60,80	575.115.000		34.165.980		162.291.980,80					5,80	196.456.980							
55		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	2,00	580.940.000			2,00	58.915.000	1,00	7.680.000	1,00	12.215.000,00					2,00	19.875.000	100,00	88,74	1,00	19.875.000	100,00	8,42	
56				media online		1,00	29.576.000																				
57				media cetak		4,00																					
58		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	1,00	846.800.000			1,00	16.200.000	1,00	8.900.000	1,00	4.500.000,00					1,00	8.400.000	100,00	51,85	1,00	8.400.000	100,00	2,42	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										4,515,041,376	4,523,952,590			10,792,227,478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	1	6	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,680,357,626	3,689,268,920			4,698,227,478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	1	6	0	2.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21,000,000	21,000,000			40,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	1	6	0	2.0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja	Aparatur pelaksana kegiatan memahami tugas dan fungsi nya, sarana dan prasarana kerja memadai, ketersediaan dana tepat waktu
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Akarnya penghambat SDKS sesuai PermenpanRB 70 tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Tindak Lanjut yang Diperlukan Di Dalam Tripartite Berikutnya *	Perubahan dan peninjauan anggaran sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi untuk pencapaian target kinerja kegiatan
Tindak Lanjut yang Diperlukan Di Luar RUPD Berikutnya *	Sesuai dengan penyusunan belanja dan pendanaan setiap susunan organisasi

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur
2.16.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	21 Orang	23 Orang		91 %	2,558,186,449	2,629,897,663	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	2,730,000,000		
2.16.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	3 Dokumen	3 Dokumen		91 %	21,000,000	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	40,700,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2161205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	Terlaksananya unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Laporan	1 Laporan		91 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	825,000	
2161207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	Terlaksananya unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Laporan	1 Laporan		91 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	550,000	
216103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											21,000,000	21,000,000			40,700,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
216102006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	7 Jenis	1 Laporan		91 %	21,000,000	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	40,700,000	
216102004	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											19,800,000	19,800,000				28,350,000	
216102007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Laporan	1 Dokumen		5 %	19,800,000	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	28,350,000	
216102005	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah											17,400,000	17,400,000				40,700,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur
216154	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksannya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	3 Kegiatan dan Laporan	1 Dokumen		91 %	17,400,000	17,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	40,700,000		
216106	Administrasi Umum Perangkat Daerah											301,758,617	242,516,288			599,552,478			
216161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	5 Jenis	1 Paket		91 %	1,940,520	1,940,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	5,554,500		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2160202	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	70 Jenis	2 Paket		91 %	113,571,143	113,571,143	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	246,980,978	
2160203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	5 Jenis	1 Paket		91 %	5,515,954	2,998,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	8,470,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
21612004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	5 Jenis	5 Jenis		91 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	4,587,000	
21612005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	3 Jenis	3 Paket		91 %	12,750,000	6,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	9,680,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2161020066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Jenis	1 Dokumen		91 %	18,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	21,780,000	
2161020069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	24 Kegiatan dan Laporan	24 Laporan		91 %	149,981,000	99,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	302,500,000	
216107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											100,000,000	100,000,000			428,400,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
216172	0172	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah yang terealisasi				91 % 91 % 91 % 91 %			91 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	250,000,000	
216175	0175	2.0	0	Pengadaan Mebel	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah mebel yang diadakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		5 Jenis	5 Jenis	91 % 91 % 91 % 91 %			91 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	48,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2161020079					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Unit	1 Unit		91 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	130,000,000	
21610208					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							461,320,000	489,160,000				570,250,000					
216102081					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	40 Buah	1 Laporan		91 %	7,000,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	9,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
21610200					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tertaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	5 Rekening	5 Laporan		91 %	329,100,000	356,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	360,000,000
21610804					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tertaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	6 Orang	3 Laporan		91 %	125,220,000	125,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	201,250,000
216109					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158,892,560	127,494,969				177,700,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2160201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	2 Unit	2 Unit		91 %	113,996,296	99,999,969	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	125,400,000	
2160202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	3 Unit	3 Unit		91 %	27,511,264	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	33,600,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
21602006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	5 Unit	5 Unit		91 %	7,500,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	12,100,000		
21602009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		91 % 91 % 91 % 91 %	1 Unit	1 Unit		91 %	9,885,000	4,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91 % 91 % 91 % 91 %	6,600,000		
21602		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										575,115,000	575,114,920		2,949,000,000				
2160201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										575,115,000	575,114,920		2,949,000,000				
21602011	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	1. Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dijalankan dengan baik 2. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dijalankan dengan baik	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	6 Kebijakan	6 Kebijakan		55 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	300,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
21620212	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup Kominfo yang ditindaklanjuti	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	35 Opini dan Aspirasi	35 Opini dan Aspirasi		55 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	37,000,000		
21620213	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	2 Jenis	2 Jenis		55 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	37,000,000		
21620214	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah konten yang dipublikasikan	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	5 Konten	5 Konten		55 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	60,000,000		
21620215	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	1 Media Online	2 Dokumen		55 %	58,915,000	58,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	106,000,000		
21620216	Pelayanan Informasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	72 Informasi Publik	1 Dokumen		55 %	16,200,000	16,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	64,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
21620210	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	70 Sdm	70 Sdm		55 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	45,000,000				
21620212	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	2 KIM	3 Dokumen		55 %	500,000,000	499,999,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	1,700,000,000				
21620213	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	Terlaksananya tata kelola layanan informasi publik, Terlaksananya tata kelola komunikasi publik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		55 % 55 %	12 Unit	12 Unit		55 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	55 % 55 %	600,000,000				
2163		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											259,568,750	259,568,750				3,145,000,000				
216301		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											0	0				1,545,000,000				
216312	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah domain yang berjalan dengan baik jumlah sub domain yang berjalan dengan baik		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			1 Domain 25 Sub domain	1 Domain 25 Sub domain				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				45,000,000				
216313	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			3 OPD	3 OPD				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1,500,000,000				
216302		Pengelolaan e-government DI Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											259,568,750	259,568,750				1,600,000,000				
216320	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang disusun	Terlaksannya OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		3,1 Indeks	1 Rencana induk	1 Rencana induk		62 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	0				

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
26	03	2023			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah Jumlah server fisik pemerintah daerah yang di kelola	Terlaksannya OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		3,1 Indeks	7 Sistem 4 Unit	7 Sistem 4 Unit		62 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	500,000,000
26	03	2027			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Terlaksannya OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		3,1 Indeks	10 Proses Bisnis	4 unit		62 %	125,068,750	125,068,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	350,000,000
26	03	2020			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksannya OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		3,1 Indeks	1 Sumber Daya	1 Dokumen		62 %	134,500,000	134,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	750,000,000
20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										0	0	665,000,000					
202					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										0	0	665,000,000					
20201					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										0	0	665,000,000					
20201					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1. Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD 2. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data 3. Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			1 Kegiatan	1 Kegiatan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				220,000,000
20201					Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			150 Sdm	150 Sdm			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.02.02.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			3 Metadata	3 Metadata			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				220,000,000
2.02.02.05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			1 Aplikasi	1 Aplikasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				150,000,000
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										17,400,000	17,400,000				270,000,000	
2.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										17,400,000	17,400,000				270,000,000	
2.12.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										0	0				200,000,000	
2.12.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang di uji keamanannya Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			1 aplikasi 2 aplikasi	1 aplikasi 2 aplikasi			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				200,000,000
2.12.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										17,400,000	17,400,000				70,000,000		
2.12.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		20 %	1 Saluran komunikasi	1 Perangkat Daerah		1 Prosedur	17,400,000	17,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	20 %	70,000,000
TOTAL												4,532,441,376	4,541,352,590				11,727,227,478	